



Ketapang Raih WTP dari BPK

Penyerahan LHP Semester II 2021 Empat Kabupaten

M Febriadi
Ketua DPRD Ketapang

Prestasi itu diharapkan bisa dilanjutkan pada tahun 2022 ini. Tentunya seluruh OPD harus bekerja maksimal dan sesuai rambu-rambu yang sudah ada, terutama dalam pengelolaan keuangan. Kita sama-sama ingin agar hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan kita meraih predikat Opini WTP. Kita ingin pengelolaan keuangan daerah kita sesuai kaidah dan aturan yang berlaku

KETAPANG, SP - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Semester II Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang

meraih Opini Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penilaian itu disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kali-

mantan Barat (Kalbar) saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Wakil Bupati Ketapang Farhan, Kamis (6/1).

Disaksikan Ketua DPRD Ketapang M Febriadi, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Rahmadi menyerahkan LHP Kabupaten Ketapang di Kantor BPK Perwakilan Kalbar Jalan A Yani, Kota Pontianak.

Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi mengapresiasi dan menyambut baik penyerahan

LHP tersebut. Dia berharap LHP Semester II Tahun 2021 Kabupaten Ketapang tetap di jalur Opini WTP.

"Catatan-catatan yang mewarnai LHP itu harus menjadi perhatian bersama, supaya tanggung jawab keuangan negara sesuai koridor," katanya.

Dia berharap, pengelolaan keuangan negara bisa terus terselenggara dengan baik di lingkungan Pemkab Ketapang. Untuk itulah, penting sekali menjaga sinergitas eksekutif dan legisla-

tif agar semakin baik, karena eksekutif dan legislatif punya kepentingan yang sama, agar hasil pemeriksaan keuangan meraih predikat Opini WTP.

"Kita harus sama-sama melaksanakan pengelolaan keuangan negara dengan memperhatikan regulasi dan rambu-rambu yang telah ditetapkan," pesan legislator Partai Golkar itu.

Febriadi menambahkan, sebagaimana laporan keuangan Pemkab Ketapang pada tahun sebelumnya yang telah berhasil meraih Opini

WTP dari BPK RI. Hal itu harus terus dipertahankan, bahkan diperbaiki lagi.

"Prestasi itu diharapkan bisa dilanjutkan pada tahun 2022 ini. Tentunya seluruh OPD harus bekerja maksimal dan sesuai rambu-rambu yang sudah ada, terutama dalam pengelolaan keuangan. Kita sama-sama ingin agar hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan kita meraih predikat Opini WTP. Kita ingin pengelolaan keuangan daerah kita sesuai kaidah dan aturan yang ber-

laku," harap Febriadi.

Acara tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang Alexander Wilyo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang Donatus Franseda, dan Inspektur Kabupaten Ketapang Repalianto.

Selain Kabupaten Ketapang, diserahkan juga LHP Semester II Tahun 2021 dari BPK RI Perwakilan Kalbar kepada Pemkab Sambas, Mempawah dan Landak. (teo/pk)